

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad M. Ramli. (2010). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Antonopoulos, Andreas M. (2017). *Mastering Bitcoin*. Sebastopol: O'Reilly Media.
- Asikin, Zainal. (2020). *Perlindungan Konsumen dalam Era Ekonomi Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2017; 2019). *Hukum Transaksi Elektronik / Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Burnham, Chris Brummer. (2019). *Cryptoassets: Legal, Regulatory, and Monetary Perspectives*. Oxford: Oxford University Press.
- Burniske, Chris & Tatar, Jack. (2018). *Cryptoassets*. New York: McGraw-Hill Education.
- De Filippi, Primavera & Wright, Aaron. (2018). *Blockchain and the Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Djatmiati, Tatiek Sri. (2020). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. (2014; 2015; 2021; 2022). *Hukum Keuangan Negara / Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Hermansyah. (2022). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Imaniyati, Neni Sri. (2009; 2016). Hukum Bisnis Telekomunikasi dan Elektronik. Bandung: Mandar Maju.
- Iman, Nofie. (2020; 2021). Fintech Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Kelsen, Hans. (1945). General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press.
- Khairandy, Ridwan. (2014; 2021). Hukum Pasar Modal / Hukum Investasi. Yogyakarta: UII Press.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2006). Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.
- Makarim, Edmon. (2005). Pengantar Hukum Telematika. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008; 2017; 2019). Penelitian Hukum / Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, Az. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Diadit Media.
- Nuryanti, E. (2022). Hukum Teknologi Finansial (Fintech) dan Aset Kripto. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahardjo, Agus. (2018). Cyber Crime dan Cyber Law. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim HS & Nurbani, Erlies Septiana. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Budi. (2022). *Hukum Investasi Digital di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Serfiani, Cita Yustisia. (2013). *Buku Pintar Bisnis Online*. Jakarta: Gramedia.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Siregar, H. (2021). *Literasi Keuangan Digital di Era Industri 4.0*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2001; 2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada / Rajawali Pers.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sutedi, Adrian. (2020). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2009). *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Grafiti.
- Tapscott, Don & Tapscott, Alex. (2016). *Blockchain Revolution*. New York: Penguin Random House.
- Usman, Rachmadi. (2021). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warjiyo, Perry. (2016). *Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Krisis Sistem Keuangan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Pemerintah Indonesia. PP Nomor 49 Tahun 2024.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015.

Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022.

Peraturan OJK Nomor 22/POJK.07/2023.

Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024.

SEOJK Nomor 20/SEOJK.07/2024.

Bappebti. Peraturan Nomor 5 Tahun 2019.

Bappebti. Peraturan Nomor 8 Tahun 2021.

Bappebti. Peraturan Nomor 13 Tahun 2022.

Kementerian Perdagangan. Permendag Nomor 99 Tahun 2018.

Kementerian Keuangan. PMK Nomor 68/PMK.03/2022.

Kementerian Keuangan. PMK Nomor 50 Tahun 2025.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Ahfanza Nugraha El Pambajeng dkk. (2023). "Kajian Normatif Kerangka Regulasi Perdagangan Aset Digital." Jurnal Cakrawala Hukum.

- Asnawi, M. Natsir. (2022). "Literasi Keuangan Digital dan Perlindungan Konsumen." *Jurnal RechtsVinding*.
- Budi Santoso. (2023). "Pengawasan Aset Digital dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Dzikry Sabara & Maslihati N. Hidayati. (2023). "Urgensi Penguatan Regulasi Cryptocurrency di Indonesia." *Jurnal Pencerah Hukum*.
- Fauzia Suhendry Sikumbang & Sri Damayanti. (2024). "Peran Bappebti dalam Pengawasan Aset Kripto." *Jurnal Studi Pembangunan dan Masyarakat*.
- Joni Laksito dkk. (2022). "Tantangan Hukum dalam Regulasi Transaksi Kripto di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Miftah Waratmaja & Maimunah R. Istiqomah. (2025–2026). "Peralihan Kewenangan Regulasi Aset Kripto di Indonesia." *Jurnal Paris Langkis*.
- Noviani, Nyoman Ayu Fitri dkk. (2024). "Problematisa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Pacta Sunt Servanda*.
- Randi, Yusuf. (2025). "Regulasi dan Legislasi dalam Sistem Hukum Indonesia." *Rechtsvinding*.
- Wijaya, Viona. (2021). "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*.
- Yunus Husein. (2021). "Pencegahan TPPU di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Bank Indonesia. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030*.
- Bappebti. (2023). *Laporan Tahunan 2023*.
- Bitcoin Whitepaper (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.
- El Salvador. (2021). *Bitcoin Law (Decreto No. 57)*.
- European Union. (2018). *AMLD5 Directive*.
- European Union. (2023). *Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA)*.
- IMF. (2022). *El Salvador Article IV Report*.
- Japan. *Payment Services Act & FSA Guidelines (2023)*.

Kompas.com. “Bappebti Resmikan Bursa Kripto Indonesia.”

OJK. (2021–2025). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.

OJK. (2023–2027). Roadmap Pengembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

OJK. (2023). SNLIK 2023.

OJK. (2024). Statistik OJK 2024.

People’s Bank of China. (2021–2022). Digital Yuan Policy Notices